



Proses Politik dan Administrasi dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah: Studi BAKESBANGPOL Prov. KEPRI

Yunus Yanuard*, Rumzi Samin, Fitri Kurnianingsih
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia
*yns_ok@yahoo.com

Abstract

The implementation of national integration policies in a region related to nation-building and politics is a complex and relevant issue that requires an effective and efficient political and administrative process. This study aims to analyze the Grindle theory on the case study of the guidelines for implementing national renewal in the province of KEPRI. The research method used is a descriptive-qualitative approach to study the political and administrative process by collecting and analyzing relevant data according to the phenomenon. The results and discussion show that the process of politics and administration based on the Grindle theory includes implementing policies divided into two aspects, namely the content of policy and the context of implementation, each having a role for actors. The findings of the Forum for National Awakening (FPK) in KEPRI play a crucial role in promoting national unity and cohesion among various ethnic groups, tribes, and communities. In the implementation of policies and administration, FPK has shown its commitment to maintaining national unity and increasing public awareness and harmony. The forum also plays a role as a mediator in resolving conflicts that arise and helps the provincial government to maintain national unity. However, there are several challenges and obstacles that will be faced in the implementation of this policy in the future. One of the challenges is the difference in opinions and visions among stakeholders involved in national integration activities. Another challenge is how to increase public awareness and harmony regarding national values. Therefore, the implementation of National Integration Policy in KEPRI still requires special attention and commitment from all relevant parties.

Keywords: *Political Process; Implementation; Policy; National Identity*

Abstrak

Implementasi kebijakan integrasi nasional di daerah terkait kebangsaan dan politik merupakan isu yang kompleks dan relevan yang memerlukan proses politik dan administrasi yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa teori grindle pada studi kasus pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah khususnya Provinsi KEPRI. Metode Penelitian pada Pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mempelajari proses politik dan administrasi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan sesuai dengan fenomena. Hasil dan pembahasan menunjukkan pada proses politik dan administrasi berdasarkan teori grindle meliputi implementasi kebijakan terbagi atas dua aspek, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) mempunyai peran aktor masing-masing. Temuannya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI berperan penting dalam mendorong persatuan dan kesatuan bangsa antar berbagai suku, suku, dan komunitas. Dalam pelaksanaan kebijakan dan administrasi, FPK telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga persatuan bangsa dan meningkatkan kesadaran dan keharmonisan masyarakat. Forum ini juga berperan sebagai mediator

dalam menyelesaikan konflik yang muncul, serta membantu pemerintah provinsi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam implementasi kebijakan ini ke depan. Salah satu tantangannya adalah perbedaan pendapat dan visi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan integrasi nasional dalam pembauran kebangsaan di daerah dalam konteks kebangsaan dan politik. Tantangan lainnya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan keselarasan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pelaksanaan Implementasi Kebijakan dalam Pembauran Kebangsaan yang di Provinsi KEPRI masih memerlukan perhatian dan komitmen khusus dari seluruh pihak terkait sehingga implementasi kebijakan di daerah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Proses Politik; Implementasi; Kebijakan; Kebangsaan

Pendahuluan

Proses politik dan administrasi dalam implementasi kebijakan pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah telah menjadi isu yang sangat relevan dan kompleks (Budimansyah, 2010; Setiawan, 2017). Hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain adalah adanya keterbatasan sumber daya dan kapasitas baik dari pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat, sehingga tidak semua kebijakan yang diarahkan dapat terlaksana dengan optimal. Selain itu, perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap kebijakan pedoman oleh pemangku kepentingan dan stakeholders yang berbeda-beda juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses implementasi.

Masalah yang dikaji dalam kajian ini adalah bagaimana proses politik dan administrasi dalam implementasi kebijakan pedoman penyelenggaraan Pembauran kebangsaan di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006. Dalam beberapa tahun terakhir, kebangsaan di Indonesia telah menjadi prioritas utama pemerintahan, terutama dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan budaya nasional (Erman & Albintani, 2018; Hermiken, 2022; Sembiring et al., 2017).

Urgensi mengangkat masalah ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, implementasi kebijakan pedoman penyelenggaraan kebangsaan di daerah memerlukan proses politik dan administrasi yang efektif dan efisien pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006. Kedua, pelaksanaan kebangsaan di daerah memerlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi, sehingga pemerintah perlu berkomunikasi efektif dengan masyarakat melalui proses politik dan administrasi (Indrawan, 2017; Miskawi, 2022; Muslimah et al., 2018). Ketiga, implementasi kebijakan pedoman penyelenggaraan Pembauran kebangsaan di daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan budaya nasional (Hasanah & Andari, 2021; Kistanto, 2018; Maharani, 2020).

Fungsi pembauran kebangsaan menjadi parameter dan solusi mitigasi dalam minimalisasi sejumlah konflik kemasyarakatan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada era globalisasi dan teknologi yang dibatasi ruang dan waktu (Hakim et al., 2022; Sainab et al., 2018). Isu konflik kemasyarakatan disebabkan munculnya kesenjangan sosial ekonomi, status sosial, dan pendidikan (Sulistiono, 2016; Winarno, 2019). Permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat terkait konflik antar penduduk, suku, etnis dan agama di setiap daerah ditangani lembaga khusus yang menjadi wadah dalam menjaring aspirasi, keluhan dan sebagai penengah pada setiap permasalahan terkait konflik antarpenduduk, suku, etnis dan agama (Buchari, 2014; Prasajo & Pabbajah, 2020; Santosa, 2016).

Organisasi yang dijadikan wadah komunikasi masyarakat dan media diskusi para pemuka adat/suku dalam membahas konflik terkait ras, etnis dan suku bangsa yaitu Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai manifestasi aspirasi masyarakat Provinsi KEPRI dibentuk melalui pelibatan kelompok masyarakat sebagai anggota yang mengelola dan melaksanakan aktivitas FPK secara simultan. Kelompok tersebut mempunyai kesadaran kolektif terhadap keanggotaannya dan saling berinteraksi. Interaksi yang dilakukan kolektif tersebut ditargetkan mampu mengkolaborasikan pendapat dan pemikiran berkembang diantara individu keorganisasian tersebut. Terkait pembahasan pembauran kebangsaan yang dijadikan refleksi dan tanggungjawab negara yang terefleksikan pada asas *to respect, to protect* dan *to fulfill* yang berperan vital dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat, menjaga keserasian dan keselarasan hidup serta menjamin terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Paryanto et al., 2022; Sari, 2021). Pembauran kebangsaan diharapkan mampu mencegah konflik vertikal dan horizontal apabila setiap warga masyarakat mengedepankan toleransi, menghargai perbedaan dan penuh kesadaran berterima terhadap kemajemukan sebagai kenyataan dan Rahmat Tuhan (Casram, 2016; Hariadi et al., 2023).

Berdasarkan survei awal di lokus yang diteliti pada wilayah yurisdiksi Provinsi KEPRI bulan Januari 2024 dan didasarkan interview dengan pimpinan lembaga terkait, mengindikasikan bahwa peranan FPK Provinsi KEPRI diperuntukkan bagi pembinaan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta diharapkan mampu menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara ras, suku dan etnis yang beragama. Aktivitas forum dialog antarkelompok masyarakat dapat mempermudah saling berdiskusi membahas permasalahan dan mencari alternatif solusi dalam permasalahan tersebut. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang implementasi kebijakan pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, serta dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan budaya nasional.

Metode

Pendekatan analisis deskriptif-kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari proses politik dan administrasi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang berupa kata-kata. Metode ini memfokuskan pada penjelasan dan interpretasi data yang diperoleh dari peristiwa atau fenomena sosial. Peneliti akan melakukan pengumpulan data sekunder terkait kondisi kebangsaan dan politik yang relevan yang ada di Provinsi KEPRI. Analisa dilakukan dengan mengkaji pada proses politik dan administrasi berdasarkan teori grindle. Dalam analisis kontekstual, peneliti akan menghubungkan data yang diperoleh dari data sekunder dan observasi dengan konteks sosial-politik yang lebih luas. Dengan demikian, metode penelitian pendekatan analisis deskriptif-kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari proses politik dan administrasi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang berupa kata-kata. Penelitian ini dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman tentang proses politik dan administrasi, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk keputusan-keputusan politis.

Hasil dan Pembahasan

1. Peristiwa Kebangsaan dan Politik di KEPRI

Pergeseran peristiwa kebangsaan dan politik dapat membawa konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat. Pada satu sisi, pergeseran ini dapat membawa perubahan

yang positif, seperti peningkatan demokrasi, kemajuan ekonomi, dan keterbukaan informasi. Namun, pada sisi lain, pergeseran ini juga dapat membawa konsekuensi negatif, seperti ketidakpastian masa depan, konflik sosial, dan hilangnya identitas nasional. Sejumlah kasus yang menjadi *trigger* ketertarikan peneliti dalam identifikasi dan analisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi KEPRI linear beberapa peristiwa, antara lain

- a. Peristiwa pada malam Minggu (28 Mei 2023) di halaman parkir McDonald's Tanjungpinang, ketika sebagian orang menyerang Satpam McDonald's.
- b. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 2023, Dalam pertemuan Adat Melayu di Balai Adat Melayu LAM Tanjungpinang untuk penyelesaian peristiwa penegroyokan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI juga telah menggelar beberapa kegiatan, seperti dialog dengan 33 suku bangsa di Provinsi KEPRI pada tanggal 5 Oktober 2023, dengan tema "Dialog Kebangsaan Mewujudkan Pemilu 2024 Damai dan Berkeadilan". Selain itu, FPK Provinsi KEPRI juga menggelar kegiatan "Goes To School" pada tanggal 4 Maret 2024, dimana pengurus FPK mengunjungi SMAN 1 Tanjungpinang.

Dalam beberapa peristiwa tersebut FPK Provinsi KEPRI sangat penting dalam membantu Pemerintah Provinsi KEPRI untuk menjaga persatuan dan kesatuan berbagai suku ras, suku dan etnis, serta untuk membantu menyampaikan berbagai program kerja Pemerintah di masyarakat. Dalam analisis ini, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Provinsi KEPRI, FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam sintesis, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.

2. Analisis Proses Politik dan Administrasi dalam Implementasi Kebijakan

Dalam penjelasan Grindle (1980) tentang implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan terbagi atas dua aspek, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup beberapa unsur, seperti kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat dari sebuah kebijakan, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak dari pengambilan sebuah kebijakan, pelaksana program, dan sumberdaya yang digunakan.

Sementara itu, lingkungan implementasi mencakup unsur-unsur seperti kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan, unsur-unsur ini sangat

penting dalam menentukan hasil akhir dari implementasi kebijakan. Dalam hal ini, hasil akhir dari implementasi kebijakan dapat berupa dampak pada masyarakat baik individu maupun kelompok-kelompok yang terlibat. Selain itu, implementasi kebijakan juga dapat menimbulkan perubahan dan penerimaan setelah dilakukan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih detail dan komprehensif terhadap unsur-unsur tersebut untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan dapat berdampak pada masyarakat dan bagaimana masyarakat merespon terhadap implementasi kebijakan.

Dalam Analisis proses politik dan administrasi dalam implementasi kebijakan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah atau instansi terkait digunakan dan diterapkan dalam praktek sehari-hari. Maka sesuai dengan studi kasus Proses Politik dan Administrasi dalam Implementasi Kebijakan Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah menggunakan teori grindle maka penjelasan analisa dapat diuraikan sebagai berikut

a. Isi kebijakan mencangkup

- 1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi; Dalam proses politik dan administrasi implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, terdapat beberapa kepentingan yang mempengaruhi.
 - a) Pertama, kepentingan Pemerintah Provinsi KEPRI sebagai institusi yang berwenang menjalankan kebijakan publik. Pemerintah Provinsi KEPRI memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi KEPRI harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
 - b) Kedua, kepentingan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI sebagai aktor kunci dalam proses politik dan administrasi implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, serta membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. FPK Provinsi KEPRI juga telah menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.
 - c) Ketiga, kepentingan masyarakat sebagai pihak yang paling dipengaruhi oleh kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mempengaruhi kebijakan publik, serta memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Dalam hal ini, masyarakat harus memiliki kesadaran dan keserasian yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan, serta memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan suasana hati yang toleransi dan demokratis.
 - d) Keempat, kepentingan tokoh-tokoh adat Melayu dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Tokoh-tokoh adat Melayu dan masyarakat harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan suasana hati yang toleransi dan demokratis, serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi.

Maka kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi proses politik dan administrasi implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Pemerintah Provinsi KEPRI, FPK Provinsi KEPRI, masyarakat, dan tokoh-tokoh adat Melayu dan masyarakat harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan suasana hati yang toleransi dan demokratis, serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Dengan demikian,

dapat dipastikan bahwa proses politik dan administrasi implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah akan berhasil melalui kerja sama antarinstansi dan antarwarga.

- 2) Tipe manfaat dari sebuah kebijakan; Analisis Tipe Manfaat dari Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dalam Proses Politik dan Administrasi di Provinsi KEPRI. Dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting sebagai aktor kunci dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat berbagai suku ras, suku, dan etnis. FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, serta membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menyampaikan berbagai program kerja di masyarakat. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Provinsi KEPRI, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah memiliki manfaat positif dalam meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan tersebut, serta membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Selain itu, kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah juga memiliki manfaat negatif, seperti konflik sosial dan hilangnya identitas nasional. Namun, FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, serta membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah memiliki manfaat positif dan negatif dalam proses politik dan administrasi di Provinsi KEPRI. FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting dalam implementasi kebijakan tersebut, serta membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah perlu dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.
- 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai; Analisis derajat perubahan yang ingin dicapai dalam proses politik dan administrasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah melalui Studi BAKESBANGPOL PROV KEPRI menunjukkan bahwa peranan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Provinsi KEPRI, FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dan membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam analisis ini, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan

kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam beberapa peristiwa, FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, seperti peristiwa-peristiwa penyelesaian pengeroyokan. Peristiwa yang terjadi pada malam Minggu (28 Mei 2023) di halaman parkir McDonald's Tanjungpinang. FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Dalam proses politik dan administrasi, FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan tujuan mencapai kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, FPK Provinsi KEPRI telah melakukan beberapa kegiatan, seperti dialog dengan 33 suku bangsa di Provinsi KEPRI pada tanggal 5 Oktober 2023, dengan tema "Dialog Kebangsaan Mewujudkan Pemilu 2024 Damai dan Berkeadilan", serta kegiatan "Goes To School" pada tanggal 4 Maret 2024, dimana pengurus FPK mengunjungi SMAN 1 Tanjungpinang. Dalam beberapa kegiatan tersebut, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Dalam proses politik dan administrasi, FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan tujuan mencapai kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.

- 4) Letak dari pengambilan sebuah kebijakan; Dalam proses politik dan administrasi, letak pengambilan kebijakan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah. Dalam konteks Provinsi KEPRI, letak pengambilan kebijakan dapat terlihat pada peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Provinsi KEPRI, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam analisis ini, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Provinsi KEPRI, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa letak pengambilan kebijakan dalam proses politik dan administrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah. FPK Provinsi KEPRI sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan tersebut telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.

- 5) Pelaksana program; Analisis pelaksanaan program dalam proses politik dan administrasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah melalui studi BAKESBANGPOL PROV KEPRI menunjukkan bahwa FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam proses tersebut. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Provinsi KEPRI, FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam analisis ini, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam beberapa peristiwa, FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Dalam sintesis, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting dalam implementasi kebijakan tersebut.
- a) FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam proses politik dan administrasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam analisis ini, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.
 - b) FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam sintesis, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
 - c) FPK Provinsi KEPRI telah menggelar beberapa kegiatan, seperti dialog dengan 33 suku bangsa di Provinsi KEPRI pada tanggal 5 Oktober 2023, dengan tema "Dialog Kebangsaan Mewujudkan Pemilu 2024 Damai dan Berkeadilan". Selain itu, FPK Provinsi KEPRI juga menggelar kegiatan "Goes To School" pada tanggal 4 Maret 2024, dimana pengurus FPK mengunjungi SMAN 1 Tanjungpinang. Dalam sintesis, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
- 6) Sumberdaya yang digunakan; Dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Provinsi KEPRI menggunakan berbagai sumberdaya yang penting dan efektif. Salah satu sumberdaya yang digunakan adalah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI. FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam mengembangkan kebijakan dan program kerja yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan keserasian

masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. FPK Provinsi KEPRI telah melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan kesadaran dan keserasian masyarakat, seperti dialog dengan 33 suku bangsa di Provinsi KEPRI, kegiatan "Goes To School" untuk meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, serta menggelar kegiatan lainnya yang terkait dengan pengembangan kesadaran dan keserasian masyarakat. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Provinsi KEPRI, FPK Provinsi KEPRI juga telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Selain FPK Provinsi KEPRI, pemerintah provinsi KEPRI juga telah menggunakan berbagai sumberdaya lainnya dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006. Beberapa contoh sumberdaya yang digunakan adalah polisi, Satpam McDonald's, serta tokoh-tokoh adat Melayu dan masyarakat. Dalam beberapa peristiwa, polisi telah berperan sebagai penjaga keamanan dan stabilitas, sementara Satpam McDonald's telah berperan sebagai penjaga ketertiban dan keamanan di daerah-daerah tertentu. Tokoh-tokoh adat Melayu dan masyarakat juga telah berperan sebagai pemegang nilai-nilai kebangsaan dan tradisi, serta sebagai penjaga identitas nasional.

b. Lingkungan Implementasi

- 1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat; Dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, terdapat beberapa aktor yang terlibat dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pemerintah Provinsi KEPRI, sebagai aktor utama, memiliki kepentingan untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Aktor lainnya yang terlibat adalah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI, yang memiliki kepentingan untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dan membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. FPK Provinsi KEPRI juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Provinsi KEPRI, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Oleh karena itu, FPK Provinsi KEPRI dapat dikatakan sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Dalam analisis kekuasaan, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi KEPRI memiliki kekuasaan formal dan legal untuk mengambil keputusan dan membuat regulasi. Sementara itu, FPK Provinsi KEPRI memiliki kekuasaan informal dan sosial untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Dalam analisis strategi, dapat dilihat bahwa FPK Provinsi KEPRI telah menggunakan strategi dialog dan kerja sama dengan berbagai suku bangsa, suku, dan etnis untuk meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. FPK Provinsi KEPRI juga telah menggunakan strategi "Goes To School" untuk mengunjungi SMAN 1 Tanjungpinang dan membantu mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang berbasis nilai-nilai kebangsaan.
- 2) Karakteristik Lembaga dan rezim yang sedang berkuasa; Dalam analisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, terlihat

bahwa Lembaga Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) memainkan peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. FPK KEPRI sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Karakteristik Lembaga FPK KEPRI yang terlihat dalam implementasi kebijakan ini adalah kemampuan sebagai aktor kunci dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. FPK KEPRI telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Provinsi KEPRI, serta membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi, FPK KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menghadapi situasi-situasi yang rawan konflik. Dalam rezim yang sedang berkuasa, Lembaga FPK KEPRI memainkan peranan strategis dalam implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Rezim yang sedang berkuasa, yaitu Pemerintah Provinsi KEPRI, telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam beberapa kegiatan yang digelar oleh FPK KEPRI, seperti dialog dengan 33 suku bangsa di Provinsi KEPRI dan kegiatan "Goes To School", Pemerintah Provinsi KEPRI telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya peranan Lembaga FPK KEPRI dalam mengembangkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Namun, dalam beberapa peristiwa yang terjadi, terlihat juga bahwa rezim yang sedang berkuasa masih memiliki beberapa kelemahan. Misalnya, dalam beberapa peristiwa konflik yang terjadi, Pemerintah Provinsi KEPRI masih kurang berhasil dalam menghadapi situasi-situasi yang rawan konflik. Dalam hal ini, FPK KEPRI telah menunjukkan kemampuan sebagai aktor kunci dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. FPK KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, serta kemampuan sebagai aktor kunci dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Rezim yang sedang berkuasa, yaitu Pemerintah Provinsi KEPRI, telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, namun masih memiliki beberapa kelemahan dalam menghadapi situasi-situasi yang rawan konflik.

- 3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana; Analisis tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) menunjukkan bahwa Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Provinsi KEPRI, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Misalnya, dalam peristiwa pengeroyokan dalam penyelesaiannya LAM telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Selain itu, dalam peristiwa yang terjadi pada malam Minggu (28 Mei 2023) di halaman parkir McDonald's Tanjungpinang, ketika sebagian orang menyerang Satpam McDonald's, FPK Provinsi KEPRI juga telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga

persatuan dan kesatuan masyarakat. Tingkat kepatuhan pelaksana dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah Provinsi KEPRI dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: pertama, kemampuan FPK Provinsi KEPRI dalam membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat; kedua, kemampuan FPK Provinsi KEPRI dalam meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan; ketiga, kemampuan FPK Provinsi KEPRI dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di daerah. Dalam analisis ini, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pelaksana dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah Provinsi KEPRI telah mencapai tingkat yang signifikan. Dampak dalam masyarakat baik itu individu maupun kelompok-kelompok yang terlibat serta Perubahan dan penerimaan setelah dilakukan implementasi.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa FPK Provinsi KEPRI berperan penting dalam implementasi kebijakan persatuan bangsa di Provinsi Kepri. FPK Provinsi KEPRI telah melakukan mediasi konflik, mengedepankan persatuan nasional, dan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuannya.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Pengimplementasian kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, sebagai Contoh pada Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI), telah menunjukkan beberapa peristiwa yang menarik dan relevan dalam analisis. Dalam beberapa peristiwa tersebut, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam membantu Pemerintah Provinsi KEPRI menjaga persatuan dan kesatuan berbagai suku ras, suku, dan etnis, serta membantu menyampaikan berbagai program kerja Pemerintah di masyarakat. Berikut adalah tabel tentang hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah di Provinsi KEPRI:

Tabel 1. Hambatan dan Tantangan pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan

No	Hambatan dan Tantangan	Kesimpulan Akhir
1	Perbedaan pendapat dan visi antar-aktor	Konflik dan ketidakpastian dapat menghambat proses penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah.
2	Meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan	FPK Provinsi KEPRI harus meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.
3	Memastikan kesetaraan dan keterwakilan semua suku ras, suku, dan etnis	FPK Provinsi KEPRI harus memastikan kesetaraan dan keterwakilan semua suku ras, suku, dan etnis dalam proses penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah.

No	Hambatan dan Tantangan	Kesimpulan Akhir
4	Perhatian khusus dan komitmen dari pihak-pihak terkait	Pengimplementasian kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah di Provinsi KEPRI memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pihak-pihak terkait.

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Namun, dalam pengimplementasian kebijakan ini, juga terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Salah satu hambatan adalah perbedaan pendapat dan visi antar-aktor yang terkait dengan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian, sehingga dapat menghambat proses penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah. Tantangan lainnya adalah bagaimana FPK Provinsi KEPRI dapat meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, namun bagaimana FPK Provinsi KEPRI dapat meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan masih menjadi pertanyaan.

Selain itu, hambatan lainnya adalah bagaimana FPK Provinsi KEPRI dapat memastikan kesetaraan dan keterwakilan semua suku ras, suku, dan etnis dalam proses penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, namun bagaimana FPK Provinsi KEPRI dapat memastikan kesetaraan dan keterwakilan semua suku ras, suku, dan etnis masih menjadi pertanyaan.

Hal ini dikarenakan FPK Provinsi KEPRI masih menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan memastikan kesetaraan dan keterwakilan semua suku ras, suku, dan etnis dalam proses penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah. Salah satu tantangan yang dialami adalah bagaimana FPK Provinsi KEPRI dapat meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan menghayati nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari identitas nasional. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, namun masih terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan, seperti bagaimana FPK Provinsi KEPRI dapat meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan memastikan kesetaraan dan keterwakilan semua suku ras, suku, dan etnis dalam proses penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah. Pengimplementasian kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah di Provinsi KEPRI masih memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pihak-pihak terkait. Dalam masa yang akan datang, FPK Provinsi KEPRI harus tetap komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, FPK Provinsi KEPRI juga harus memastikan kesetaraan dan keterwakilan semua suku ras, suku, dan etnis dalam proses penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah di Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) telah menunjukkan beberapa peristiwa yang menarik dan relevan dalam analisis. Dalam beberapa peristiwa tersebut, Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam membantu Pemerintah Provinsi KEPRI menjaga persatuan dan kesatuan berbagai suku ras, suku, dan etnis, serta membantu menyampaikan berbagai program kerja Pemerintah di masyarakat. Dalam proses politik dan administrasi implementasi kebijakan menggunakan Teori Grindle, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. FPK Provinsi KEPRI juga telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, serta membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Bukuobor.
- Budimansyah, D. (2010). Tantangan globalisasi terhadap pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 11(1), 7–13.
- Bungin, B. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Casram, C. (2016). Membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198.
- Erman, E., & Albintani, M. (2018). Politik Identitas dan Negara Bangsa di Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(29), 1–13.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation In The Third World*. Princeton University Press.
- Hariadi, J., Wilsa, W., & Nucifera, P. (2023). Penguatan Wawasan Kebangsaan untuk Mencegah Paham Radikalisme dan Intoleransi di Kalangan Pelajar SMK Di Kota Langsa. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 12588–12595.
- Hasanah, L. U., & Andari, N. (2021). Tradisi Lisan sebagai Media Pembelajaran Nilai Sosial dan Budaya Masyarakat. *Jurnal Ilmiah FONEMA : Jurnal Edukasi Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(1), 48–66.
- Hermiken, S. (2022). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 4(2), 1–10.
- Indrawan, R. M. J. (2017). Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 16(2), 171–179.
- Johnston, M. P. (2014). Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*, 3(3), 619–626.
- Kistanto, N. H. (2018). Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Indonesia. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 13(2), 169–178.
- Hakim, A. L., Salmande, A., & Qawi, M. R. (2022). Analysis of Typology of Institutional Changes in KESBANGPOL Serang Regency. *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 7(2), 69–81.
- Maharani, A. (2020). Budaya Bahari Dan Tradisi Masyarakat Maritim Nusantara. *Jurnal Sekilas Ikahimsi*, 1(1), 1–8.
- Miskawi, M. (2022). Pengembangan Desa Kebangsaan Patoman Melalui Festival Kebangsaan Dalam Pengabdian Pada Masyarakat. *Jurnal Bina Ilmu Cendekia*, 3(1).
- Moleong, L. J. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslimah, R., Chotimah, U., & Faisal, E. (2018). Peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam Rangka Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 5(1), 80–93.

- Paryanto, P., Wance, M., Hadi, A., & Suhu, B. La. (2022). Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(2), 150–164.
- Prasojo, Z. H., & Pabbajah, M. (2020). Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(1).
- Sainab, S., Ridha, M., Suaib, S., & Purnomo, A. (2018). Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOL & LINMAS) Kota Sorong. *Jurnal Fase Kemajuan Sosial Dan Politik: Faksi*, 3(4), 14–23.
- Santosa, R. (2016). Analisis Framing Pemberitaan Etnis Tionghoa Dalam Media Online Republika Di Bulan Februari 2016. *Journal E-Komunikasi*, 4(1), 1–12.
- Sari, P. D. (2021). Wawasan Nusantara Sebagai Cara Pandang Dan Sikap Bangsa Indonesia Mengenal Diri Serta Lingkungannya Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *OSFPreprints*.
- Sembiring, N. V., Isdaryanto, N., & Suhardiyanto, A. (2017). Program Kerja Badan KESBANGPOL dan Linmas dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. *Unnes Political Science Journal*, 1(2), 181–191.
- Setiawan, D. (2017). Kontribusi tingkat pemahaman Wawasan Nusantara terhadap sikap nasionalisme dan karakter kebangsaan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 20–33.
- Sulistiono, B. (2016). Dinamika Pembauran Kebangsaan dalam Masyarakat Multietnis di Indonesia. *Ruang Serbaguna Gelanggang Olah Raga (GOR)*, 121.
- Winarno, R. (2019). Pembauran Kebangsaan Dalam Perspektif Pendidikan. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 2(1).